

SKRIPSI
EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN
PAJAK PADA DINAS PEDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NUR ASIA
105730479314



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018

**Evaluasi struktur pengendalian intern atas
penerimaan pajak pada dinas
pendapatan daerah
kota Makassar**

**Nur Asia
105730479314**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah putus asa dalam menghadapi kegagalan karena kegagalan itu sesungguhnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadikanlah kegagalan itu sebagai batu loncatan, tumpuan, dan motivasi untuk meraih kesuksesan.

Semangat yang dibutuhkan adalah semangat memecahkan

Dan menyelesaikan masalah bukan mempermasalahkan

masalah apalagi mempersulitnya.

Keberhasilan adalah tetesan-tetesan dari kerja keras, penderitaan,

luka, pengorbanan, dan kecemasan. Sedangkan kegagalan

adalah tetesan-tetesan dari kemalasan,

minder, dan tidak bergairah.

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan Kami telah menghilangkan darimu beban. Yang memberatkan punggungmu. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 1-8)

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

Kedua almarhum orangtuaku, saudaraku, serta orang-orang yang menyayangiku atas cinta dan kasih yang tulus demi masa depanku



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Penerimaan Pajak Pada Dinas Pendaatan Daerah Kota Makassar"
Nama Mahasiswa : Nur Asia
No Stambuk/NIM : 105730479314
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.

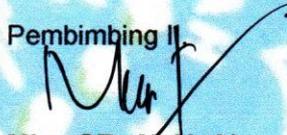
Makassar, 27 Oktober 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Jamaluddin M. SE., M.Si
NIDN: 2006117201

Pembimbing II


Mira, SE., M.Ak.Ak
NIDN: 0903038807

Diketahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Prodi,

Program Studi Akuntansi


Ismail badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Nur Asia, 105730479314, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198/2018 M, Tanggal 27 Dzulhijjah 1439 H/ 30 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Dzulhijjah 1439 H

Makassar,

27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP (.....)
2. Mira, SE., M.Ak.Ak (.....)
3. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
4. Dr. Hj. Ruliaty, MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asia

Stambuk : 105730479314

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Evaluasi Struktur Pengendalian Intrn Atas Penerimaan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, 27 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,



Nur Asia

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

ABSTRAK

Nur Asia, Tahun 2018 evaluasi struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak pada dinas pendapatan daerah kota Makassar. Skripsi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah makkassar. Di bimbing oleh pembimbing I bapak Jamaluddin, dan pembimbing II ibu mira.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota makassa. Data penelitian ini di peroleh kuesioner. Model analisis data yang di gunakan dalam penelitian iini adalah *descriptive kualitatif* . berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pengendalian intern terkait penerimaan pajak daerah pada dispenda kota Makassar telah sesuai dengan uu nomor 60 tahun 2008. Hal ini dilihat dari ICQ yang telah dilakukan crocc check.

Kata kunci: pengendalian intern, penerimaan pajak.

ABSTRACT

Nur Asia Years 2018 evaluates the structure of internal control over tax revenues in the city revenue office of Makassar. Thesis of accounting study program of economics and business faculty of Muhammadiyah University of Makassar guided by I Mr. Jamaluddin supervisor and pembimbing II Mrs. Mira.

This study aims to determine the extent to which the application of the internal control structure to the regional revenue office of the city of Makassar. This research data obtained a questionnaire, the data analysis model used in this study was descriptive qualitative. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the internal control structure related to regional tax revenue in the city of Makassar is in accordance with Law No. 60 of 2008. This is seen from the ICQ that has been done.

Keywords: internal control of tax revenue.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt karena atas berkat, rahmat dan hidayahnyalah sehingga penyusunan Skripsi ini selesai sesuai dengan waktu yang diperlukan. Salam dan shalawat kepada baginda Rosulullah saw, Sang intelektual sejati ummat manusia yang menyampaikan pengetahuan dengan cahaya Ilahi, dia juga manusia yang mencapai akal Mustofaq, manusia cerdas manusia paripurna.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Soisologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua yang telah memberikan motifasi sejak lahir hingga hari ini merekalah manusia luar biasa yang pernah memberikan kasih sayang langsung pada saya tanpa perantara dan tanpa pamri. Terimah kasih juga penulis ucapkan kepada semua kaka-kaka saya yang berada di Jurusan Sosiologi dan Jurusan lain yang tidak sempat disebutkan, teman-teman pengurus BEM FKIP dan adik-adik pengurus HMJ Pend. Sosiologi yang sudah banyak membantu penulis dalam berbagai masalah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dr.H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, ismail rasulong sebagai Dekan Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, ismail badollahi, Ketua Program Studi ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar , jamaluddin selaku pembimbing satu. Dan juga ibu dosen Mira se., ak,. Selaku pembimbing dua terima kasih juga kepada Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas hingga penulis dapat menikmati dan memperoleh pengetahuan dengan nyaman dan tidak ada paksaan dalam memperoleh pengetahuan dari semua kalangan baik dari kalangan para dosen dewan senior maupun sesama teman-teman mahasiswa.

Penulis merasa Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam menyempurnakan Skripsi ini. Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari impelementasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridho disisinya, Amin.

Makassar, oktober 2017

Nur asia

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	5
1. Struktur Pengendaakian Intern	5

a. pengertian sistem pengendalian intern	5
b. komponen komponen pengendalian intern	6
c. tujuan pengendalian intern	13
d. unsur-unsur pengendalian intern	13
2. Pajak Daerah	22
a. Pengertian pajak daerah	22
b. tarif pajak daerah	24
c. Perundang-Undangan Pajak/Retribusi Daerah	24
3. Penerimaan pajak	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Metode Pengumpulan Data	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Metode Analisis	33
BAB IV hasil dan pembahasan	
A. Gambaran umum kota Makassar	34
B. Gambaran umum Dispenda kota Makassar	35
a. sejarah singkat dispenda kkota Makassar	35
b. visi dan misi	36
C. Uraian tugas dan jabatan	37
BAB V pembahasan dan hasil penelitian	

A. Analisis data	44
1. sistem dan pprosedur pembayaran	44
2. prosedur yang terkait	45
3. dokumen yang terkait	46
4. identifikasi sistem dan prosedur	48
5. evaluasi sistem penengendalian	49
B. Perkembangan pendapatan	50
C. Pembahasan	55

Bab VI PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Kerangka Pikir	40
Gambar 1.2 Struktur Instansi	54

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Anggaran Dan Realisasi Pajak	66
Tabel 2.2 Daftar Jumlah Wajib Pajak Hotel	67
Tabel 2.3 Daftar Jumlah Wajib Pajak Tempat Wisata	68
Tabel 2.4 jumlah wajib pajak hotel	70
Tabel 2.5 Penerimaan Pajak Hotel	72
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Wisata	74
Tabel 3.2 Penerimaan Pajak Wisata	76
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pad	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian interen merupakan salah satu kunci utama sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, baik itu organisasi swasta yang berorientasi pada laba maupun organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba. Pengendalian internal menjadi sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan pengendalian intern yang baik, Atau dengan kata lain kualitas pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kinerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *GOOD GOVERNANCE* dalam instansi pemerintah, beberapa hambatan seperti yang dituliskan Ritribusi (2014) bahwa kasus mafia pajak yang menyoroti sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angket, dan masih banyaknya instansi yang memperoleh opini *disclaimer* atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK terkhusus pada Pemkab Tahunan 2012 yang di berikan oleh BPK.

Menurut susilawati dan dwi (2014) bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester 1 tahun 2012 menunjukkan adanya 5,036 kasus kelemahan SPI yang terdiri dari tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan-kelemahan ini terjadi dikarenakan para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak mentaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Akuntabilitas kinerja pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana disetiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Dinas Pendapatan Daerah merupakan organisasi politik yang orientasinya meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki peran yang sangat strategis yakni : “sebagai pengelola utama terbesar pendapatan asli daerah (PAD) berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Jadi sudah sepatutnya Dinas pendapatan Daerah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah secara konsisten dan tidak menyalahi aturan sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan tertib, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilatar belakangi penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif, sehingga di butuhkan suatu sistem yang di dapat memberi keyakinan memandai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pembangunan nasional menurut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah, pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 1 ayat 10 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah “apakah struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota makassar telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 60 tahun 2008

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas masalah pokok yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota makassar

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini di harapan mampu memberikan manfaat di antaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Untuk menambahkan pengetahuan mengenai penerimaan pajak dan menambahkan pengalaman.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penerimaan pajak, selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan pajak daerah pada dispenda .

2. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat memberikan sumbangan dan yang bermanfaat kepada dispenda dalam penerapan struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan kota makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Struktur Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di kordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan ofisiensi di dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu.

Tahun 1949, *American institute of certifiield public accountants* yang di kutip marom, mendeinisikan bahwa "pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua cara dan alat-alat yang di kordinasikan semua cara dan alat-alat yang di koordinasikan dan dipergunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga ke amanaan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan menjaga agar kebijakan yang di tetapkan dapatdi laksanakan dengan sebaik-baiknya".

Menurut james hall (2011:180) perbuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian intern adalah ke wajiban pihak manajemen yang penting, aspek mendasar dari tanggung jawab pengendalian informasi pihak manajemen adalah untuk memberikkan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan di kendalikan dengan baik. Selain itu pihak manajemen bertanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta infestor dengan informasi keuangan yang handal dan tepat waktu.

Pengertian di atas di simpulkan bahwa pengendalian intern adalah sebagai suatu proses, yang di pengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang di rancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

b. Komponen- Komponen Pengendalian Intern

Menurut Hall, A James. 2013. Pengendalian intern mencakup lima kategori dasar dalam ruang lingkup perusahaan yang masing-masing terdiri dari kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipatuhi. Pengendalian intern terdiri atas :

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian resiko
- 3) Aktivitas pengendalian
- 4) Info dan komunikasi
- 5) Pamantauan

Kelima unsur pengendalian tersebut harus ada dan berfungsi untuk menyimpulkan bahwa struktur pengendalian intern efektif dalam setiap kategori tujuan, berikut ini penjelasan kelima pengendalian intern tersebut.

a. Lingkungan Pengendalian

Menurut Hall, A James 2013. Pengendalian merupakan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini :

1) Integritas Dan Nilai-Nilai Etika

Integritas dan nilai-nilai adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut di komunikasi dan dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensitas dan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur,

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut berubah menjadi keterampilan.

3) Falsafah Manajemen Dan Gaya Operasi

Menetapkan, mempertahankan dan memonitor pengendalian intern atas entitas merupakan tanggungjawab manajemen. Filosofi manajemen dan gaya operasi dapat secara signifikan mempengaruhi mutu pengendalian intern, karakter yang seperti berikut dapat memberi syarat informasi yang penting kepada auditor mengenai filosofi manajemen dan gaya operasi :

- a) Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memonitor resiko bisnis
- b) Sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan
- c) Sikap manajemen terhadap pengolahan informasi, fungsi dan personil akuntansi.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada, ini biasanya juga menghubungkan garis arus komunikasi, dengan memahami struktur organisasi klien,

auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan mmenaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan.

5) Dewan Komisaris Dan Komite Audit

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independent dari manajemen dan anggota-oanggotanya aktif dan menilai aktifitas manajemen. Komite audit biasanya diberi tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern dan ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Agar menjadi efektif. Komite audit harus memelihara komunikasi yang terus menerus dengan baik auditor interen maupun auditor ekstern.

6) Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab

Di samping aspek komunikasi informal yang telah disebutkan, metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab dalam masalah sejenis yang berkaitan dengan pengendalian, organisasi forrmal dan rencana operasi, tugas pegawai dan kebijakan terkait, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai seperti perbedaaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.

b. Penilaian Resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, sebagai contoh, penaksiran resiko dapat di tunjukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak dapat dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang dicatat dalam laporan keuangan, resiko yang relevan dalam pelaporan keuaangan yang andal berkaitan dengan peristiwa dan transaksi khusus. Resiko yang relevan degan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan

keadaan intern atas maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personal baru
- 3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- 4) Teknologi baru
- 5) Operasi luar negeri
- 6) Standar akuntansi baru

c. Aktivitas Pengendalian

Menurut Hall, A James 2013. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan . kebijakan ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian terdiri atas :

1) Pengendalian Pengolahan Informasi

Pengendalian pengolahan informasi berkaitan erat dengan proses otoritas, kelengkapan dan keakuratan data keuangan.

2) Pengendalian Umum

Pengendalian umum berkaitan dengan lingkungan pengolahan informasi secara keseluruhan dan meliputi pengendalian terhadap pusat operasi pusat data, akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, access security, pengembangan dan pemeliharaan pengembangan sistem, misalnya pengendalian untuk mengembangkan program baru suatu entitas untuk sistem akuntansi

yang ada harus mencakup dokumentasi yang memandai dan penjualan sebelumnya implementasi.

3) Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi yaitu : pengendalian yang di tunjukan utuk pemrosesan tipe-tipe transaksi di lingkungan dan keakuratan computer maupun manual dapat diklafikasikan sebagai berikut :

- otoritas yang tepat, dimana setiap bukti transaksi sudah diotorisasi secara tepat sehingga tidak ada bukti yang melawati prosedur.
- pencatatan dan dokumentasi, dimana semua bukti transaksi telah di catat didokumentasikan dan bila akan di periksa dapat di lacak kembali.
- Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang di independen.

d. Informasi Dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan system akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva atau kewajibann yang berhubungan dengan komunikasi melibatkan suatu penyedia suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan,

Fokus utama dari sistem akuntansi adalah transaksi. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara suatu entitas dan pihak luar, dan juga pemindahan untuk penggunaan aktiva dan jasa ke dalam antitass fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah transaksi yang ditangani dengan suatu cara yang dappat mencegah terjadinya salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen. Oleh karena itu suatu sistem akuntansi yang efektif harus :

- 1) mengidentifikasi dan mencatat hanya transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode yang berjalan
- 2) memastikan aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan entitas hak untuk, atau kewajiban untuk item-item tersebut.
- 3) Mengatur nilai transaksi dalam suatu cara yang mengajukan pencatatan nilai moneter transaksi secara tepat dalam laporan keuangan
- 4) Memperoleh rincian yang mencukupi dari semua transaksi untuk memungkinkan penyajian secara tepat dalam laporan keuangan, termasuk pengklasifikasian yang tepat dan pengungkapan yang diperlukan.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangannya dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Kualitas pengendalian dapat memperoleh dampak buruk melalui berbagai cara, seperti tidak memenuhi syarat perubahan kondisi.

c. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006:11) pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan : a) Realibilitas Pelaporan Keuangan. b) Efektivitas dan operasi perusahaan dan (c) kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. Dalam peraturan pemerintah dalam negeri No 58 tahun 2005 (pasal 1

ayat 61) memberikan defenisi sistem pengendalian intern keuangan daerah merupakan :

“Suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan.”

d. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut : Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menetapkan unsur lingkungan pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah waktu kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Penilaian resiko, tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian resiko yang akan dihadapi, oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada didalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaia visi dan misi organisasi. resiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat di sebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penelitian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi resiko yang ada kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan

kekayaan yang memandi bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang di maksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian itu sendiri.

Siklus pendapatan adalah penerimaan kas. Departemen yang terlibat dalam kegiatan penerimaan kas ini adalah kasir, yaitu bagian yang berada di bawah departen keuangan, yang bertugas menangani penerimaan kas dan penyetoran ke bank, dan bagian piutang dagang, yaitu bagian yang berada di bawah manajer akuntansi dan bertugas untuk mencatat pelunasan piutang dari pelanggan. Pemisahan semacam ini cukup efektif memisahkan fungsi penjagaan dan pencatatan, sehingga mengurangi risiko pencurian kas.

Keputusan dan informasi yang di perlukan, karna kas dapat dicuri dengan mudah, maka kas tersebut perlu memperoleh perlindungan yang memadai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah tidak memberikan wewenang bagi bagian piutang/penagihan untuk memiliki akses fisik terhadap kas atau cek.

Meskipun demikian, penerimaan kas harus dicatat secara akurat, dan rekening pelanggan harus dikredit secara tepat jika ada pelunasan. Untuk

melaksanakan hal ini, fungsi piutang dagang harus mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan kas, dan faktur yang berhubungan untuk dikreditkan ke rekening piutang yang bersangkutan. Salah satu metode yang telah dibicarakan sebelumnya adalah mengirim dua lembar faktur, dan meminta pelanggan mengembalikan salah satu diantaranya ketika pelanggan melakukan pelunasan. Jika pada tembusan faktur tersebut terdapat ruang yang cukup bagi pelanggan untuk menuliskan jumlah rupiah yang dibayarkan, maka data penerimaan kas tersebut dapat *di-input-kan* dengan menggunakan mesin OCR, dan dengan demikian dapat mengeliminasi potensi kesalahan selama *entry* data. Alternatif solusi yang dapat pula dilakukan adalah menugaskan bagian penerimaan surat untuk membuat daftar rincian nama pelanggan dan nilai pelunasan masing-masing, atau meng-*copy* bukti kas masuk dan mengirimkan informasi tersebut ke bagian piutang dagang.

Dokumen, catatan yang digunakan, dan prosedur. Gambaran tentang prosedur penerimaan kas dengan model pengolahan data secara kelompok (*batch processing*) disajikan dalam bentuk bagan air (*flowcart*) dan narasi berikut ini.

a. *Petugas Penanganan Surat Masuk*

- a) Departemen ini mula-mula menerima amplop pelunasan dari pelanggan, kemudian dua orang petugas membuka dan mengeluarkan cek beserta bukti kas masuk.
- b) Setelah dilakukan pemeriksaan visual, departemen ini akan mengesahkan (*endorse*) cek dengan cara membubuhkan tanda tangan diruang khusus di balik lembar cek, dan membuat daftar penerimaan kas sebanyak 3 lembar.
- c) Selanjutnya, departemen ini akan mendistribusikan daftar penerimaan kas sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 bersama-sama dengan ceknya diserahkan ke bagian kasir, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan setoran ke bank.
 - b. Lembar ke-2 diserahkan ke bagian internal audit, yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rekonsiliasi bank setiap bulan.
 - c. Lingkungan ke-3 bersama-sama dengan bukti kas masuk diteruskan ke bagian piutang, untuk digunakan sebagai dasar memutakhirkan catatan piutang.
- b. *Bagian Piutang.*
- d) Bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan bukti kas masuk, kemudian memasukkan data penerimaan kas ke komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebuturut tanggal. Bagian ini menggunakan terminal *on-line*, untuk memasukkan jumlah daftar penerimaan kas sebagai sebuah *batch total*, nomor pelanggan, nomor faktur, dan nilai pelunasan.
- c. *Departemen Pengolahan Data*
- e) Setelah komputer menerima data penerimaan kas, departemen ini akan menjalankan program edit untuk memverifikasi akurasi *entry* data, yaitu sebagai berikut.
 - a. Cek validitas terhadap nomor pelanggan dan nomor faktur.
 - b. *Closed-loop verification* untuk menjamin bahwa rekening yang dikredit tepat. Setelah petugas memasukkan nomor rekening pelanggan, sistem menayangkan nama pelanggan yang berhubungan dengan nomor tersebut dan menanyakan untuk konfirmasi bahwa nama yang ditayangkan telah benar.
 - c. Cek *field* data untuk menjamin bahwa hanya nilai numerik yang dimaksudkan untuk *field* nilai pembayaran.

- d. Penjumlahan seluruh nilai yang dimasukkan dan perbandingan total tersebut dengan total *batch* yang telah dimasukkan sebelumnya oleh petugas, jika kedua angka tersebut cocok, maka *batch* diterima dan *file-file* yang berhubungan dimutakhirkan.
- f) Selanjutnya departemen ini akan menjalankan program pemburuan catatan piutang, untuk mengkredit *file* induk pelanggan sebesar nilai pelunasan, mecap lunas faktur dan mencatatnya ke *file sales history*, dan mencatat seluruh kas yang diterima *file* penerimaan kas. Selanjutnya, komputer akan mencetak bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke kasir.

d. *Kasir*

- g) Bagian ini mula-mula menerima daftar penerimaan kas dan cek dari petugas penanganan surat masuk. Selanjutnya bagian ini menerima 2 lembar bukti setor bank dan membandingkan bukti setor bank dengan cek dan daftar penerimaan kas, setelah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut.
- h) Selanjutnya kasir menyetorkan kas dan bukti setor bank bank dan mengarsipkan daftar penerimaan kas urut tanggal (catatan: salah satu lembar bukti setor bank, oleh bank akan dikirimkan langsung kebagian internal audit yang akan membuat rekonsiliasi bank setiap bulan).

e. *Bagian Piutang*

- i) Setiap bulan, bagian ini akan membuat dan mencetak laporan pelanggan bulanan dan mengirimkannya kepada setiap pelanggan.

Peluang penggunaan teknologi informasi. Proses yang diuraikan di atas, mencakup 3 tahap yang menciptakan penundaan waktu antara saat penjualan dilakukan dan saat perusahaan menerima pembayaran. Sumber penundaan waktu yang pertama adalah saat pelanggan membayar melalui pos. Kedua, saat perusahaan memproses penerimaan kas. Ketiga, antara saat cek disetorkan dan ketika bank memasukkan setorannya ke saldo rekening perusahaan.

Perusahaan dapat mengurangi kehilangan waktu tersebut dengan menggunakan *lockbox* bagi bank. *Lockbox* adalah alamat pos yang dapat dituju oleh pelanggan yang mengirimkan pelunasan melalui pos. Alamat pos ini disediakan khusus oleh kantor pos sehingga memungkinkan bank yang berhubungan untuk mengambil kiriman cek beberapa kali dalam sehari dan mendepositkan setoran tersebut ke rekening perusahaan. Kemudian bank mengirim bukti kas masuk, daftar penerimaan kas elektronik, dan *fotocopy* seluruh cek ke perusahaan. Jika sistem ini digunakan, umumnya perusahaan memilih *lockbox* dari beberapa bank di berbagai wilayah penjualannya sehingga dapat mengefisienkan waktu pengambilan pelunasan.

Teknologi informasi dapat memberikan tambahan efisiensi dalam penggunaan *lockbox*. Dengan menggunakan *lockbox* elektronik, bank dapat secara elektronik mengirimkan informasi perusahaan tentang nomor rekening pelanggan dan nilai perusahaan segera setelah menerima.

2. PAJAK DAERAH

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010:9) pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sedangkan menurut Zuraidah (2012:31) pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Menurut prof, Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam mardiasno (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Penyuluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di daerah. Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai budgeter dan reguler, fungsi pajak sebagai budgeter adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi pajak sebagai budgeter adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi reguler adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. dari definisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah mempunyai hubungan yang erat hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah NO 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa pajak pada dasarnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Iuran Atau Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu di sebut sebagai pemunguttan

b) Pajak Di Pungut Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipukul oleh rakyat banyak,

sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringgannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di perlemen atau dewan perkilan rakyat.

b. Tarif Pajak Daerah

Mardiasmo (2013:13) Tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

1. Tarif Pajak Provisi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor Sebesar 10%
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebesar 20%
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar 10%
- d) Pajak Air Permukaan Sebesar 10%
- e) Pajak Rokok Sebesar 10%

2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel Tarif Sebesar 10%
- b) Pajak Restoran Sebesar 10%
- c) Pajak Hiburan Sebesar 35%
- d) Pajak Reklame Sebesar 25%
- e) Pajak Penerangan Jalan Sebesar 10%
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebesar 25%
- g) Pajak Parkir Sebesar 30%
- h) Pajak Air Tanah Sebesar 20%
- i) Pajak Sarang Burung Walet Sebesar 10%
- j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebesar 0,3%
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebesar 5%

c. Perundang-Undangan Pajak/Retribusi Daerah

Undang-undang (UU) No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini secara garis besar mengatur mengenai dua hal. Pertama, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Kedua, menetapkan peraturan yang cukup rinci untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi.

Pasal 4 ayat (1) UU No.34 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak daerah di tetapkan dengan peraturan daerah (perda). Begitu pula menurut pasal 24 ayat (1) bahwa retribusi daerah ditetapkan juga dengan perda. Perbuatan

perda baik tentang pajak daerah maupun tentang retribusi daerah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan-peraturan lain terutama dengan undang-undang tentang otonomi daerah.

Persoalan yang muncul dengan dibukanya peluang tersebut, di lapang banyak perda PDRD yang di buat tetapi bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi antara lain juga karena baik dalam UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 34 Tahun 2000 tidak mengenal pengawasan preventif dalam bentuk evaluasi rancangan perda (raperda) oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, persoalan ini menjadi semakin rumit kepada perda tersebut dibatalkan dalam Negeri , tetapi pemerintah daerah tetap memperlakukannya alias tidak menghentikan pelaksana dan atau mencabutnya.

d. Retribusi Daerah Dalam Struktur Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 6 UU No. 34 tahun 2000 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Begitu pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebaagai suatu kewajiban hukum tanpa pertimbangan secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan yang biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruhnya atau sebagian dari biaya pelayanan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktik perbedaan antara

keduanya tidak selalu jelas. Pertama, retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi biaya jasa-jasa yang diberikan. Kedua, suatu jasa mungkin hanya sebagian diibiayai oleh retribusi, sisanya berasal dari subsidi khusus terselubung dari penerimaan pajak

3. Penerimaan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian neegara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara k karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Muhlis & Sinanjuntak, 2011).

Sejak reformasi perpajakn tahun 1983 pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan upaya dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yakni dengan merubah sistem pemungutan pajak darri office *assessment*. Dalam hal ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaaporkan sendiri jumlah pajak atas terutang. Selain itu, waib pajak ikut turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi perpajakan. Wajib Pajak diharuskan setiap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan yaitu pemeriksaan pajak (suhendra, 2010).

Noor (2013), Harimulyono (2008) dan suryadi (2006) menyatakan bahwa antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif. Lain halnya dengan Simanjuntak (2009) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan hal ini dilihat dari rendahnya penerimaan pajak diakibatkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah.

Pendapatan lain juga di kemukakan oleh Alfian (2013) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya terhadap perubahan penerimaan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Lestari (2010), menganalisis kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli Daerah Kota Bogor, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD kota bogor tahun 2004-2009 dari pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan yaitu realisasi rata-rata pertahunnya sebesar Rp 79.593.804.604,00.

Anggraeni (2012), kontribusi pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 2010 dan 2011, hasil dari penelitian menunjukkan, tingkat pencapaian realisasi pajak daerah kabupaten sleman tahun 2010 sebesar 106,11%, dan tahun 2011 sebesar 111,3%, sedangkan tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten slema tahun 2010 sebesar 99,95% dan tahun 2011 sebesar 111,46%. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten sleman dalam pemungutan Pajak Daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak

Akbar (2010) analisis potensi, analisis aktivitas dan analisis besarnya pengaruh PDRB perkapita, jumlah los dan kios terisi terhadap penerimaan retribusi pasar, retribusi pasar dinyatakan efektifitas dan evesien dan jumlah los berpengaruh positif dan signifikan

Pakadang (2013) Evaluasi penerapan pengendalian intern Penerimaan kas pasa Rumah Sakit Gunung Maria Sistem pengendalian intern pemerintah kas telah memandai sesuai dengan unsur-unsur sistem peendalian intern, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu: penilaian resiko dan pemantauan masih perlu di perhatikan.

Karamoy (2013) Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas Di dinas pendapatan daerah kota manado prosedur penerimaan kas di dinas

pendapatan kota manado menunjukkan bahwa secara umum DISPENDA kota manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai ketentuan peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaan pengendalian intern belum begitu memadai, karena dalam pelaksanaan aktivitas belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk itu perlu di perhatikan baik.

Tamalumu 2012 Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan, dan aset kabupaten kepulauan sangihe Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset kabupaten kepulauan sangihe. Hasil penellitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan. dan Aset Kabupaten.

TABEL

Gambar 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1.	Lestari (2010)	Menganalisis kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli Daerah Kota Bogor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD kota Bogor tahun 2004-2009 dari tahun penerimaan Kota Bogor yang berasal dari pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan yaitu realisasi rata-rata per tahunnya sebesar Rp 79.593.804.604,00.	Kontribu pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu 48,33 persen dan terendah 40,93 persen pada tahun 2005. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah sebesar 45,48 persen. Kontribusi terbesar didapatkan dari pajak restoran sebesar 14,97 persen dari faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan Asli Daerah kota Bogor yaitu jumlah wisatawan dan jumlah wajib pajak.
2.	Anggraeni (2012)	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 2010	Hasil dari penelitian menunjukkan, tingkat pencapaian	Sedangkan tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten sleman tahun

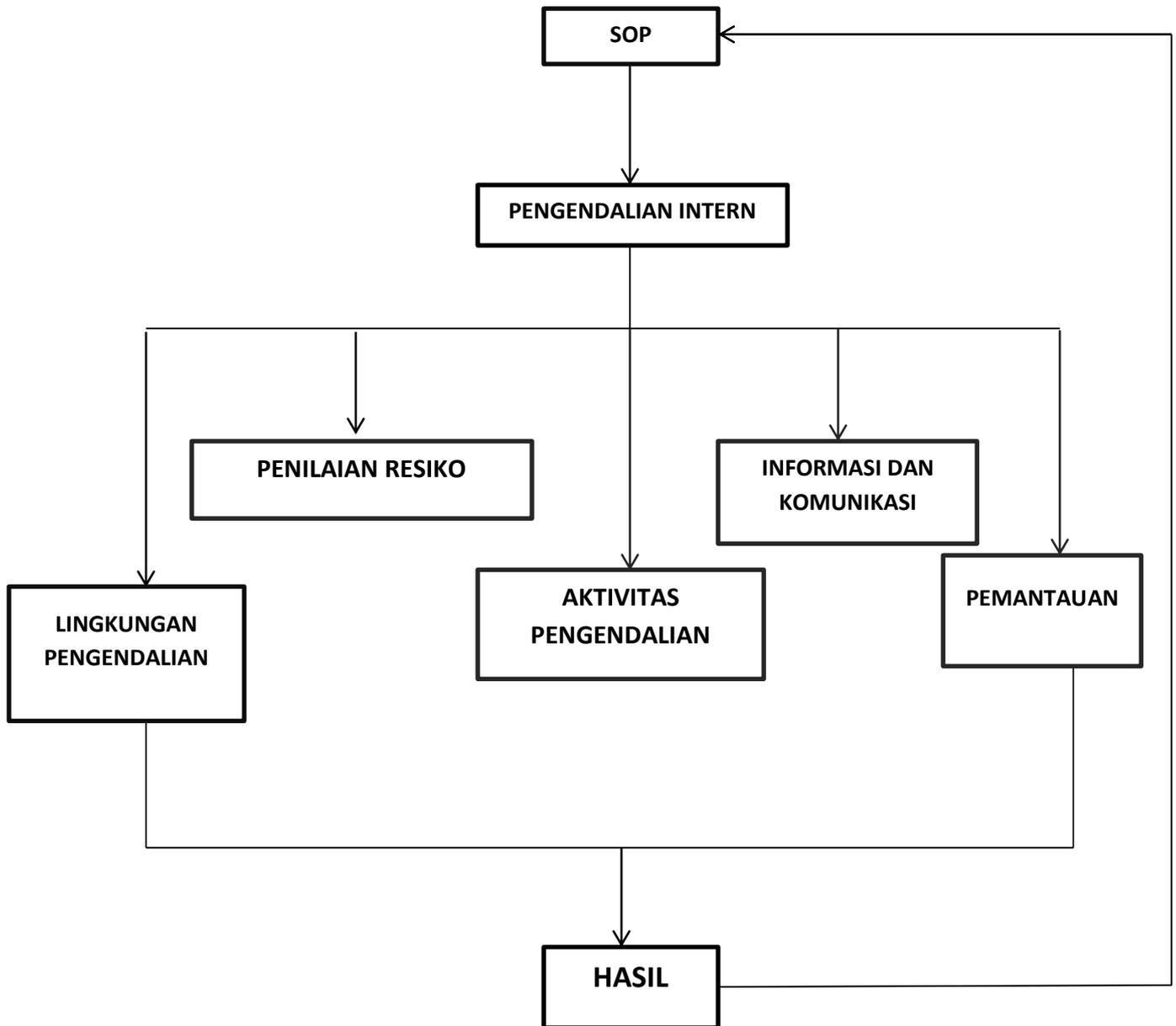
		dan 2011	realisasi pajak daerah kabupaten sleman tahun 2010 sebesar 106,11%, dan tahun 2011 sebesar 111,3%,	2010 sebesar 99,95% dan tahun 2011 sebesar 111,46%. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten sleman dalam pemungutan Pajak Daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak
3.	Akbar (2010)	Analisis potensi	Analisis efektivitas dan analisis besarnya pengaruh PDRB perkapita	Jumlah los dan kios terisi terhadap penerimaan retribusi pasar, retribusi pasar di nyatakan efektifitas dan evesien dan jumlah los terpengaruh positif dan signifikan
4.	Pakadang (2013)	Evaluasi penerapan pengendalian intern	Penerimaan kas pasa Rumah Sakit Gunung Maria	Sistem pengendalian intern pemerintah kas telah memandai sesuai dengan unsur-unsur sistem peendalian intern, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu: penilaian resiko dan pemantauan masih perlu di perhatikan,
5.	Karamoy (2013)	Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas	Di dinas pendapatan daerah kota manado	prosedur penerimaan kas di dinas pendapatan kota manado menunjukkan bahwa secara umum DISPENDA kota manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai ketentuan peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaan pengendalian intern belum begitu memadai, karena dalam pelaksanaan aktivitas belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk itu perlu di pperhatikan baik.
6.	Tamalumu (2012)	Analisis Penerapan	Pengelolaan keuangan, dan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

		Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan	aset kabupaten kepulauan sangihe.	penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset kabupaten kepulauan sangihe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan. dan Aset Kabupaten
--	--	--	--------------------------------------	--

C. Kerangka Pikir

Pengendalian interen dapat juga disebut sebagai struktur pengendalian interen yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi, dalam struktur pengendalian intern atas penerimaan pajak setiap perusahaan memiliki sistem operasional pengendalian intern dimana pengendalian intern itu adalah aktivitas pengendalian atau rencana, metode dan prosedur, selain itu pengendalian intern atas penerimaan pajak memiliki penilai resiko juga informasi dan komunikasi yang berperang penting untuk suatu perusahaan atas penerimaan pajak. Pengendalian intern akan bernilai hasil jika telah melalui tahap selanjutnya yaitu pemantaun dan lingkungan pengendalian maka pengendalian intern akan bernilai hasil (Hall, A James. 2013).

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir digambarkan, bagan alur kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah kota makassar dan jangka waktu penelitian selama 2 bulan lamanya, terhitung dari bulan maret sampai april 2018

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian, untuk mendapatkan data-data tersebut digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Interview yaitu mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pimpinan dan pengurus perusahaan yang di teliti.
- b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, kemudian mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
- c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang di anggap perlu.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data yang di gunakan oleh penulis adalah :
 - a. Data kuantitatif, yaitu : data yang berupa angka-angka seperti laporan biaya operasional,
 - b. Data kualitatif, yaitu : data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif.

2. Sumber Data :
 - a. Data Primer, yaitu : data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian.
Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan

wawancara atau pengajuan pernyataan kepada pejabat dan pegawai dinas pendapatan daerah kota Makassar, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan dinas pendapatan daerah (masyarakat)

- b. Data Sekunder, yaitu : data yang diperoleh dari dinas pendaptan daeraah dan sudah terolah dan didapatkan lewat dokumen-dokumen, dan mengaji buku-buku, referensi-referensi tentang system pengendalian intern yang ada kaitannya dengan objek kajian

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penlisan ini adalah *descriptive kualitatif*, yaitu membandingkan struktur pengendalian intern yang diterapkan oleh dinas pendapatan daerah kota Makassar dengan teori yang berhubungan dengan struktur pengendalian intern. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern dinas pendapatan Daerah Kota Makassar dilakukan dengan beberapa tahapan yang berdasarkan pada salah satu struktur pengendalian intern

Tahapan analisis data :

1. Melihat structur organication dan membandingkan dengan *Job Description*
2. Membandingkan *Job Description* dengan yang terjadi di lapangan
3. Mengisi ICQ yang berkaitan dengan SPI
4. Melakukan CROSS CHERCK transaksi terkait dengan otoritasi
5. Menarik simpulan daru data yang ada

BAB IV

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wilikotamadya Nomor 155/ Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya keputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimsaukan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

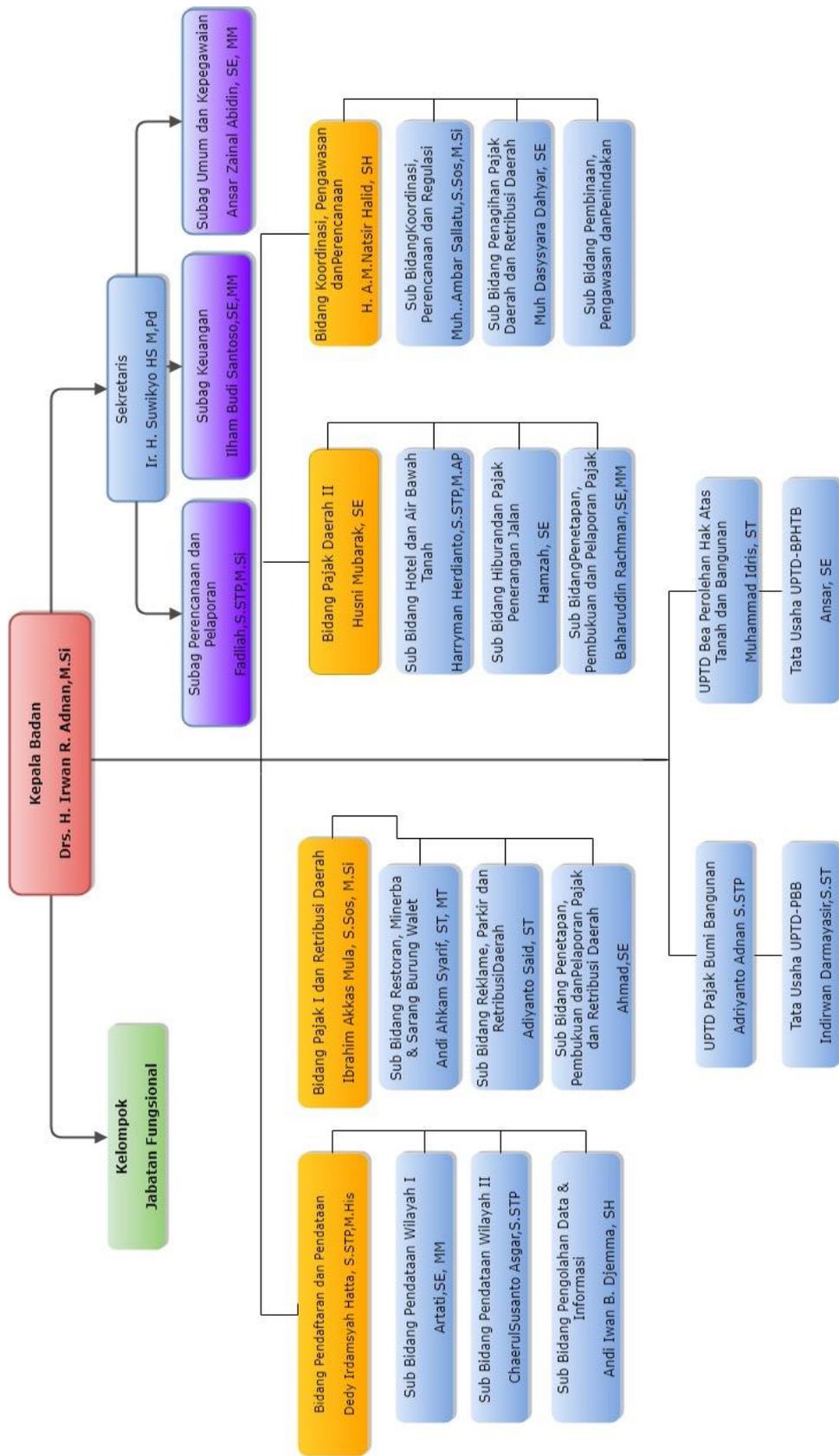
b. Visi dan Misi

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Yaitu Sebagai Berikut.

- a. Visi DIPSEKDA Kota Makassar Dinas Pendapatan, Prima dalam dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Misi Dispenda Kota Makassar
 - 1) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal
 - 2) Menyempurnakan system pengelolaan PAD
 - 3) Meningkatkan kordinasi
 - 4) Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah
 - 5) Meningkatkan pengawasan pengelolahan pendapatan daerah
 - 6) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
 - 7) Melakukan evaluasi secara berkala
 - 8) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan
 - 9) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan,dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

B. Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Kota Makassar

Struktur organisasi ini memperhatikan secara singkat dan jelas seberapa aktivitas yang dilakukan para pegawai di DISPENDA kota Makassar, stuktur organisasi merupakan gambaran hirarki pendegelasan, terlihat setiap bagian secara detail yang turut membantu tugas seorang pemimpin. Struktur organisasi DISPENDA kota makassar dilihat pada gambar tersebut



1. Kepala Dinas

Merencanakan, Merumuskan, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantu Di Bidang Pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Dipimpin Sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan dinas pendapatan kota makassar. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca skpd;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- e. Pengkoordinasikan perumusan program dan rencana kerja dinas
Pengelolaan kesekretariatan;
- f. pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh utusan.

3. Subbagian umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian.
- b. Mengatur melaksanakan, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.

- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun.
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Melakukan koordinasi pada sekretariat korpri kota makassar;
- j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota kopri pada unit kerja masing-masing
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. dalam melaksanakan tugas subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan;
- b. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen perencanaan anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke bappeda melalui kepala dinas;
- d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan kerja;

- f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan subbagian perlengkapan;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Subbagian perlengkapan

Subbagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas subbagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi;

- a. Menyusun rencana dan program kerja dinas pendapatan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dinas;
- c. Membuat usulan rencana kerja kebutuhan barang unit (RKBU) sekretariat dan bidang-bidang;
- d. Membuat daftar kebutuhan barang (RKB);
- e. Membuat rencana tahunan barang unit (RTBU);
- f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada dinas pendapatan;
- h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I pajak hotel dan hiburan

Bidang I pajak hotel hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendapatan, penetapan, keberatan, pembukaan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan. Dalam

melaksanakan tugas bidang I pajak hotel dan hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas bidang fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendapatan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran Dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Administrasi, Pendapatan, Penetapan, Keberatan, Penagihan, Pembukuan, Verifikasi Dan Pelaporan Pajak Restoran Dan Pajak Parkir.

Dalam melaksanakan tugas, bidang II pajak restoran dan pajak parkir menyelenggarakan fungsi:

Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendapatan, penetapan, keberatan, penerbitan surat tetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak restoran dan pajak parkir;
- b. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya;
- d. Melaksanakan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah

Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas, bidang III pajak reklame dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV koordinasi, pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bantuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-ajak retribusi;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

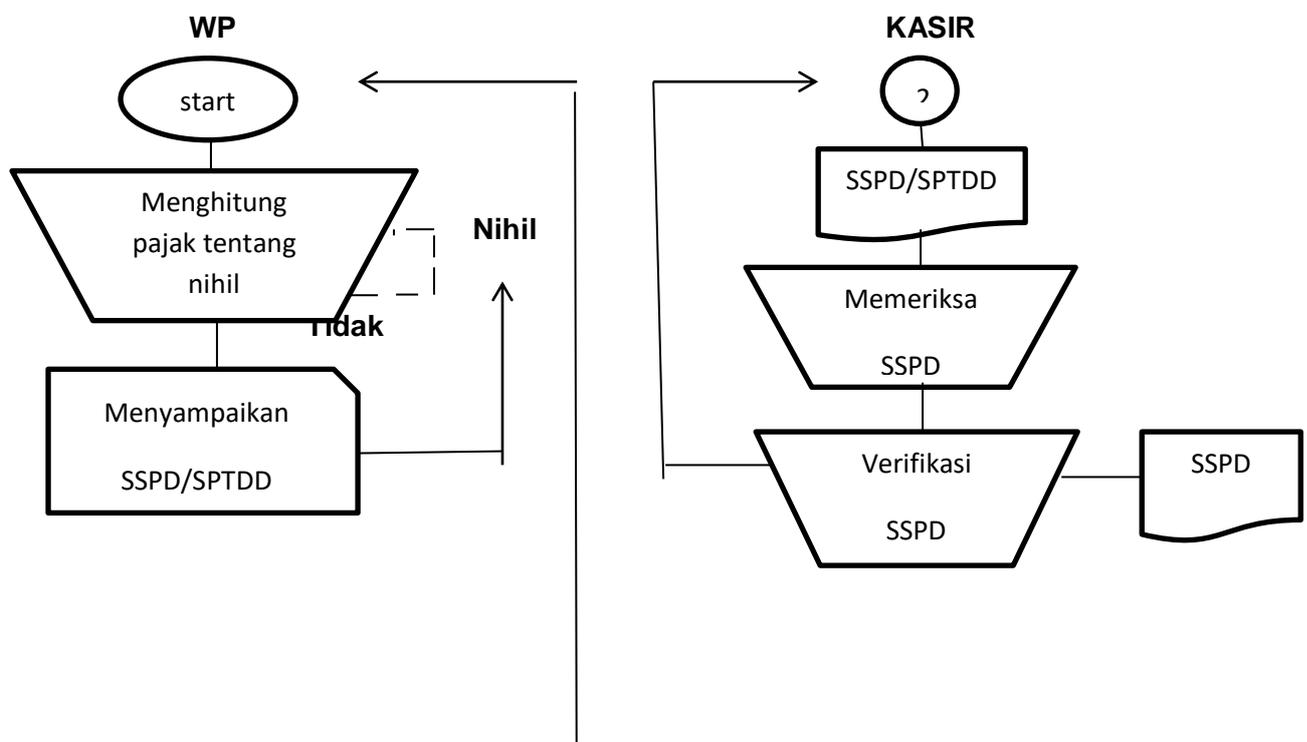
1. Sistem dan prosedur pembayaran/ penerimaan Pajak Daerah Pada Dispenda Kota Makassar

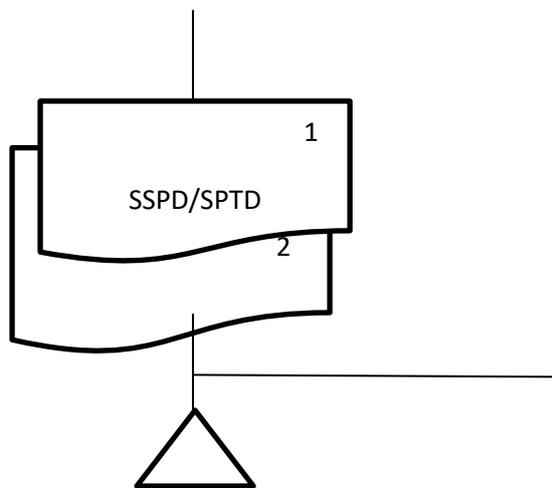
Adapun sytem dan prosedur pembayaran / penerimaan Pajak Daerah Pada Dispenda Kota Makassar dapat diuraikan seperti berikut ini :

- a. Wajib pajak menghitung pajak terutang berdasrkan rekapitalis omzet/bill.
- b. Wajib Pajak akan menentukan pajak terutang nihil atau tidak. Jika Ya, maka Wajib Pajak akan mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD ke Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan. Jika Tidak nihil, maka Wajib Pajak akan menentukan apakah akan membayar lunas atau tidak. Demikian juga untuk Wajib Pajak yang menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- c. Wajib Pajak akan membayar lunas atau tidak. Jika Tidak, Wajib Pajak akan mengajukan permohonan penundaan atau angsuran ke Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan. Jika Ya, Wajib Pajak mengisi SSPD dan SPTPD secara benar, lengkap, dan jelas. Tetapi untuk Wajib Pajak yang akan membayar SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, maka hanya mengisi SSPD tanpa SPTPD.
- d. Wajib Pajak akan menentukan melakukan pembayaran ke Kasda secara langsung, Bendahara Penerimaan atau transfer melalui bank lain.
- e. Jika pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kasda atau Non Kasda, maka Wajib Pajak harus menyerahkan bukti transfer, rincian perhitungan dan daftar pembayaran serta penetapan (khusus PPJ) dan seluruh lembar SSPD dan SPTPD ke Seksi Pendataan, pendaftaran. Penetapan dan Penagihan.

- f. Jika pembayaran dilakukan ke Kasda secara langsung, maka Wajib Pajak menyerahkan uang beserta SSPD dan SPTPD ke Kasda.
- g. Kasda akan menerima pembayaran pajak dan memeriksa SSPD.
- h. Kasda akan menentukan dokumen SSPD telah benar, lengkap, dan jelas. Jika Tidak, Kasda akan mengembalikan dokumen SSPD dan SPTPD ke Wajib Pajak untuk dibetulkan dan dilengkapi. Jika Ya, Kasda akan menandatangani dan menstempel SSPD.
- i. Kasda akan menyerahkan SSPD lb 1 dan SPTPD lb 1 ke Wajib Pajak, mengarsip SSPD Lb 2, dan menyerahkan SSPD lb 3, SSPD lb 4, dan SPTPD lb 2 secara periodik ke Seksi Penetapan.

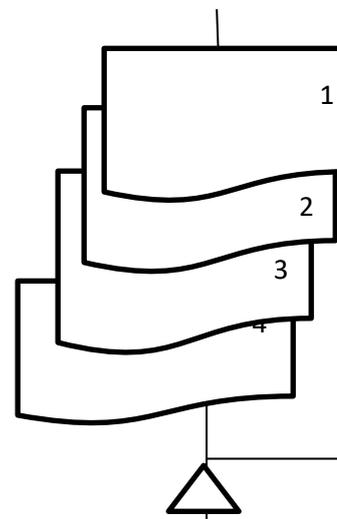
2. Prosedur yang terkait dalam penerimaan pajak daerah Pada Dispenda Kota Makassar.





- L₁ : Di serahkan ke wp**
L₂ : Arsip
L₃ : SSP
L₄ : Diberi ke seleksi penetapan

Benar



3. Adapun Dokumen-dokumen yang terkait dalam penerimaan pajak daerah Pada Dispenda Kota Makassar

Adapun Dokumen-dokumen yang terkait dalam penerimaan pajak daerah Pada Dispenda Kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Formulir Pendaftaran yang sudah terisi
- b. Kartu NPWPD
- c. Daftar Induk WP
- d. SSPD
- e. SPTPD
- f. SKPD
- g. SKPDKB
- h. SKPDKBT

- i. STPD
- j. Surat Permohonan Penundaan/Anggsuran.

4. Identifikasi Sistem dan Prosedur penerimaan pajak daerah Pada Dispenda Kota Makassar.

Berdasarkan data analisis yang dilakukan oleh penulis di lapangan terdapat Kelebihan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah, diantaranya:

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah menetapkan Standard Operating Procedure Pajak Daerah yang sudah menunjukkan sebuah fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan sehingga dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
- b. Dalam prosedur penerimaan pajak daerah, penyetoran pajak terutang pengusaha sendiri dapat menyetorkan langsung ke bank yang telah di tentukan.

Sedangkan Kelemahan pada sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yaitu, sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dispenda Kota Makassar bendahara masih melakukan proses pendataan dan pendaftaran wajib pajak sehingga terjadinya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadi kecurangan dan transaksi yang tidak sebenarnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan dengan yang dijalankan oleh Dispenda Kota Makassar khususnya bidang pendapatan. Pemisahan fungsi, tanggung jawab dan job description yang jelas agar bisa terjadi internal check dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Evaluasi sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah kota makassar berdasarakan unsur-unsur sistem pengendalian intren.

Berdasarkan data analisis yang dilakukan penulis atas jawaban ICQ (Internal Control Questioner) atas pelaksanaan pengendalian intern pada Dispenda Kota Makassar diperoleh hasil bahwa:

1. Lingkungan Pengendalian dimana setelah membandingkan unsur SPI dengan fakta dilapangan dan atas pedoman ICQ diperoleh hasil bahwa:
 - a. pada point Peningkatan integritas dan nilai etika sudah bagus, hal ini dapat dilihat pada Strategi, visi dan Misi serta tujuan dari Dispenda Kota Makassar dengan rutin melakukan pengawasan dan pengolahan pendapatan daerah, ini juga terlihat dari hasil ICQ dengan jawaban ya.
 - b. Selanjutnya pada point Pembentukan struktur organisasi Dispenda Kota Makassar yang dibuat sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan kompetensi SDM yang dimiliki (dimana hasil ICQ dengan jawaban ya).
 - c. Pada Point Kepemimpinan yang kondusif yang sudah sesuai dengan SPI perda dimana terdapat interaksi pimpinan dengan karyawan terkait dengan kebijakan (dibuktikan dengan hasil ICQ dengan jawaban ya), selain itu figur kepala dinas dalam berpilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Pendapatan
 - d. Selanjutnya pada point Komitmen terhadap kompetensi dimana dari hasil perbandingan unsur-unsur SPI sesuai Perda dapat

dinyatakan belum sesuai hal ini dikarenakan pada beberapa pengangkatan jabatan tertentu masih terdapat unsur kedekatan, unsur kesamaan budaya serta adanya hubungan kekeluargaan, ini juga terbukti berdasarkan hasil ICQ dengan jawaban tidak,

- e. Sedangkan point terakhir yaitu Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM telah sesuai hal ini terbukti dengan adanya pemberian pelatihan serta diklat pegawai.
- f. Penilaian Resiko dimana setelah membandingkan unsur SPI dengan fakta dilapangan dan atas pedoman ICQ diperoleh hasil untuk point Identifikasi resiko telah sesuai, hal ini terbukti dengan adanya pergantian (perolangan) pegawai khususnya pada bagian penagihan untuk meminimalkan resiko kerjasama yang dilakukan oleh WP dengan pegawai. Sedangkan pada point Analisis Resiko dimana jika terdapat pegawai yang melakukan kecurangan atau penyalahgunaan akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
- g. Aktivitas Pengendalian dimana setelah membandingkan unsur SPI dengan fakta dilapangan dan atas pedoman ICQ diperoleh hasil sudah sesuai, hal ini terbukti dengan adanya struktur organisasi dan pemisahan tugas yang jelas pada tiap-tiap bagian serta terdapat otorisasi yang memadai terkait dengan bukti atau dokumen yang ada seperti SSPD, SPTPD, SKPD,

- SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dan masih banyak dokumen-dokumen lain terkait dengan penerimaan pajak daerah.
- h. Infotmasi dan komunikasi dimana setelah membandingkan unsur SPI dengan fakta dilapangan dan atas pedoman ICQ diperole hasil sudah sesuai, hal ini sesuai dengan hasil ICQ dengan 4 point dimana keseluruhan menjawab ya, yang artinya terdapat sistim penunjang kinerja yang terdiri dari system olahan data dan terdapat kolom layanan keluhan WP
- i. Pemantauan dimana setelah membandingkan unsur SPI dengan fakta dilapangan dan atas pedoman ICQ diperoleh hasil sudah sesuai hal ini dilihat dari adanya petugas WASKAT dari Dispenda serta BK selaku Audit Eksternal yang akan senantiasa melakukan evaluasi terkait dengan aktivitas Dispenda.

Tabel 4.1

Rangkuman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Berdasarkan UU Nomor 60 tahun Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

No	Unsur-Unsur SPI	Evaluasi	Keterangan
1	Lingkungan Pengendalian		
	a. Peningkatan Integritas dan Nilai Etika	Sesuai	Dasarnya adalah pada strategi dari visi, misi dan tujuan Dispenda Kota Makassar
	b. Pembentukan Struktur Organisasi Sesai kebutuhan	Sesuai	Hal ini terlihat dari garis dan staf setiap wewenang dan tugas dalam struktur organisasi Dispenda Kota Makassar
	c. Kepemimpinan yang kondusif	Sesuai	Hal ini terlihat dari adanya interaksi antar pimpinan dengan pengawai jika ada menerapkan suatu kebijakan dan terlihat dari visi dan misi Dispenda Kota

			Makassar
	d. Komitmen Terhadap Kompetensi	Belum Sesuai	Hal ini terlihat dalam pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian
	e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Sesuai	Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pelatihan khusus seperti diklat pemangangan kepada pegawai khususnya bidang pendapatan
2	Penilaian Resiko		
	a. Identifikasi Resiko	Sesuai	Identifikasi risiko diperlukan untuk pendeteksian dini menyangkut kemungkinan terjadinya resiko pada penerimaan pajak daerah
	b. Analisis Resiko	Sesuai	Mencari solusi untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko
3	Kegiatan Pengendalian	Sesuai	adanya otorisasi yang memadai, pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadai.
4	Informasi dan Komunikasi	Sesuai	Tersedianya SIMDA sebagai penunjang kinerja
5	Pemantauan	Sesuai	Ini terlihat dengan adanya petugas pengawasan dalam bentuk Waskat (pengawasan melekat) dan BPK selaku audit eksternal pemerintah

Sumber : Data Dispenda Kota Makassar Diolah (2018)

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa Pemerintah Daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari pendapatan asli daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Makassar dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang di milikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintah di Kota Makassar, berikut ini akan disajikan data tentang membangun realisasi Pendapatan daerah sejak tahun 2014-2016.

Tabel 4.2
perkembangan pajak daerah kota makassar periode 2014-2016

Tahun	Keterangan	Target	Realisasi	Selisi
2014	Total Pendapatan	750,506,544,000	655,362,121,024	951,444,229,76
2015	Total Pendapatan	904,432,575,000	709,962,895,492	194,469,679,508
2016	Total Pendapatan	1,193,018,343,000	879,579,142,506	313,439,200,494

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2018, data diolah

tabel 4.2 menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Daerah selama Tiga tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 mencapai Rp 655,362,121,024 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 709,962,895,492. Sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp 879,579,142,506.

Peningkatan ini sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dimana daerah sudah mulai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan dan realisasi PAD Kota Makassar tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensi. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak dan retribusi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Secara intensifikasi, usaha yang telah dilakukan berupa pemberlakuan/pelaksanaan sistem pungut sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Mapatda, diadakan penyempurnaan administrasi secara/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi, diadakan pendekatan kepada masyarakat/wajib retribusi melalui menyuluhan-penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Tim penagihan yang ditunjuk dengan Surat perintah tugas, diadakan pencarian tunggakan secara berkesinambungan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenalan dengan perubahan data penyampaian surat keterangan retribusitepat pada waktunya, mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti kursus-kursus/penataran

mengenai pendapatan Daerah. Sedangkan secara ekstensifikasi seperti mendata ulang obyek-obyek retribusi yang ada dengan cara menerbitkan administrasi dan penyusuaian tarif retribusi melalui Perubahan Peraturan Daerah.

Dasar hukum yang di gunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi
- 2) Peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pajak daerah.
- 3) Peratutan daerah nomor 02 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 03 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan walikota makassar tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

c. Pembahasan

Berdasarkan data analisis yang dilakukan bahwa evaluasi struktur pengendalian intern pada dispenda kota makassar telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (lihat table 4.1). ini berarti pengendalian intern pada dispenda kota makassar telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, terbukti dengan adanya job description yang jelas disetiap bagian, adanya pelatihan atau diklat bagi karyawan dalam hal peningkatan SDM kedepannya, selain itu adanya pengawasan baik pihak intern dari Dispenda Kota Makassar maupun BKP selaku pengawas eksternal juga mendukung tercapainya visi dan misi dari Dispenda Kota Makassar. Selain itu, penetapan Pajak Daerah yang sudah menunjukkan sebuah fungsi dan tanggung jawab yang dilaksanakan sehingga dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, dimana dalam hal pembayaran WP langsung melakukan pembayaran sendiri. Terlebih lagi dalam hal penganangan resiko, ada strategi dan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi resiko yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di

lakukan oleh Pakadang (2013) Pengendalian intern pada Rumah Sakit Maria telah memadai sesuai dengan unsur-unsur SPI.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian adalah: Struktur pengendalian intern terkait penerimaan pajak Daerah pada Dispenda Kota Makassar telah sesuai dengan UU Nomor 60 tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan oleh data yang dilakukan penulis, maka ada beberapa saran yang diberikan.

1. Pada bagian pendapatan perlu ada pemisahan fungsi, tanggung jawab dan *job description* yang jelas agar bisa terjadi internal *check* dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan untuk agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak daerah berjalan dengan baik.
3. Perlu ada *rooling* posisi untuk setiap pegawai, khususnya bagian penagihan untuk mengindari adanya penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggareni, Dini. 2012 . Kontribusi PAD terhadap pajak daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Sleman). Fakultas Ekonomi diakses <http://eprints.uny.ac.id/7755/> tanggal 06 januari 2018 Pukul 11.23 WITA
- Akbar. 2010. Analisis evektivitas dan analisis besarnya pengaruh PDRB perkapita.[http://reposit,ory,umg.ac.id>bltsream>handle](http://repository.umg.ac.id/bltsream/handle)
- Alfian, Rahmad. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi Terhadap Penerimaan Pajak di KKP Pratama Surabaya Krembangan. Jurnal Akuntansi UNESA, 1(3)hal.11-hal17.
- Bodnar, George H, & Wiliam S. Hopwood 2006. Sistem informasi akuntansi.Andi, Yogyakarta.
- Harimulyono, Nurrohman. (2008) Pengaruh Efektifitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Oenerimaan Pajak Daerah. Media Ekonomi,8(1),hal.14
- Hall James, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta
- Karamoy, Rone Lucia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Vol 1, No. 3.<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108877&val=1025>. Diakses 28 februari 2018 . Hal. 939-948.
- Lestari, Tunjung. 2010. Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Skripsi.Institu Pertanian Bogor. <http://Repository.ipb.ac.id/handle.123456789/62707>. Diakses 15 April, 2015.
- Madiasmo, 2013, Perpajakan, Edisi Revisi \2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhlis, Imam & Timbul Hamonangan Simanjuntak (2011). Pentingnya kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan kesejahteraan Hidup Masyarakat. Maksi, 2011.
- Noor, Anasthasya M. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, 1(1), Hal.14.
- Pakadang, Desi. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Intrn Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Wenang Maria Di Tomohon. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Vol 1, No. 3.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2652>.Diakses28februari2018

Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)

Suhendra. Euprasia Susy. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal ekonomi bisnis, 15(1), hal.59-hal.63.

Siahaan, Marihot P.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. JayaGrafindo Persada, Jakarta.

Tamalumu, Satriawan. 2012. Analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Zuraida, ida. 2012 teknik penyusunan peraturan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah). Sinar grafika, jakarta

Perundang undangan pajak/retribusi daerah <https://www.online-pajak.com/id/undang-undang-28-tahun-2009>

Lampiran

Kuesioner

pengendalian intern

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pajak daerah yang terdapat tertuan dalam penda kota makassar atau aturan lainnya ?	✓	
2.	Apakah akan dilakukan pendisiplinan pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap prosedur pemungutan pajak daerah ?	✓	
3.	Apakah pengangkatan pegawai di dasrkan pada meja kerja, kemampuan, golongannya, dan pangkat pegawai?		✓
4.	Apakah terdapat pengawasan yang ketat yang dilakkukan oleh dispenda DPPK kota makassar, terhadap karwayan yang lailai (meninggalkan kantor pada saat jam kerja)?	✓	
5.	Apakah pola kepemimpinan kepala dispenda kota makassar di lakukan dengan akuntabel, transparan dengan bawahan atau sebaliknya ?	✓	
6.	Apakah struktur organisasi dispenda kota makassar yang di buat di bentuk sesuai kebutuhan, dengan SDM yang di manfaatkan ?	✓	
7.	Apakah penempatan pegawai sesuai golongan dan penyeleksian calon pegawai negeri sipil aau pemanfaatan <i>out sourcing</i> ?		✓
8.	Apakah dispenda kota makassar bekerja sama dan memiliki hubungan kerja dengan istansi pemerintah lainnya ?	✓	
9.	Apakah pimpinan selalu – dan karyawan tertentu kebijakan ?	✓	

Penilaian resiko

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajuan permohonan, dan pemberian izin penyelenggaraan pajak daerah oleh dispenda kota makassar?	✓	
2.	Apakah bagian terdapat persetujuan pegawai penagihan ?	✓	
3.	Apakah jika terjadi karyawan -	✓	

Aktivitas pengendalian

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat sosialisasi mengenai tata cara membayar pajak daerah ?	✓	
2.	apakah evaluasi kinerja dari masing-masing pegawai sering dilakukan ?		✓
3.	Apakah visi-misi dan tujuan dari dispenda, disampaikan secara jelas oleh DPPK kepada seluruh pegawai ?	✓	
4.	Apakah terdapat uraian atau jabatan program kesejahteraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi karyawan ?	✓	
5.	apakah terdapat otorisasi yang mencukupi atas aktifitas pengelolaan data pada dispenda kota makassar ?	✓	
6.	Apakah ada batas terminal entri data pada masing masing bagian ?		✓
7.	Apakah pengertian atau pemrosesan seluruh transaksi telah di otorisasi sebelumnya ?	✓	
8.	Apakah terdapat pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ?		✓
9.	Apakah jika terdapat pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah ?		✓

Informasi dan komunikasi

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah tersedia kolom layanan keluhan yang dapat di akses wajib pajak ?	✓	
2.	jika terdapat layanan apakah di lakukan secara online ?	✓	
3.	Apakah kolom layanan tersebut banyak dikunjungi, oleh wajib pajak ?	✓	
4.	Apakah terdapat sistem – kinerja	✓	

Pemantauan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat tindakan tegas mengenai penepatan ketentuan pembayaran pajak daerah ?	✓	
2.	Apakah terdapat sanksi yang dikenakan apabila terdapat WP yang melanggar atau menyelahi ketentuan yang ada ?	✓	
3.	Apakah dispenda kota makassar sering melakukan survai langsung kelapangan terkait dengan masalah yang ada di lapangan	✓	
4.	Apakah terdapat petugas pegawai internal dari dispenda	✓	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 03 Juli 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 1912 -II/BKBP/VII/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 8721/S.01/PTSP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **NUR ASIA**
NIM/ Jurusan : 105730479314 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENERIMAAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR "**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **03 Juli s/d 09 September 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP

Pangkat 5 Pembina

NIP. 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis BPT Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 2147 / BAPENDA / 074 / IX / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Nur Asia**
NIM / Jurusan : 105730479314 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR"**.

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 03 Juli s/d 09 September 2018 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 September 2018

An. KEPALA BADAN
Sekretaris



Ir. H. Suwiknyo HS, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19670813 199203 1 013

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop.Sul-Sel di Makassar.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
4. **Nur Asia**
5. Arsip

BIOGRAFI PENULIS



Penulis skripsi berjudul "Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Penerimaan Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar" adalah Nur Asia lahir di Ujung Pandang , 15 November 1996. Ia anak ke enam dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri bapak H Saangkala dan Ibu HJ Maryam . Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl kima raya (Bontojai) No.17 Kecamatan Tamalanrea Kab. Kota Makassar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN Negeri Bontojai lulus tahun 2008, SMP MTSn 2 Biringkanaya Makassar lulus tahun 2011, SMA 6 Negeri Makassar lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.